

RENSTRA 2025-2026

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Timur



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur berakhir pada tahun 2024, sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca Pemilu Kepala Daerah Serentak secara Nasional pada tahun 2024, maka diperlukan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah transisi sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Jawa Timur Tahun 2025-2026.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan periode rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024, bahwa Gubernur yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2024, untuk Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Startegis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2025-2026.

RPD dan Renstra PD Provinsi Tahun 2025-2026 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah dan dipergunakan sebagai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Dalam Renstra PD 2025-2026 terdapat perubahan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada Kemendagri 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang – undangan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025 - 2026 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

- 2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421)
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- 6) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
- 7) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
- 8) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- 10) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10) Undang-Undang No.17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

- 11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
- 12) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
- 20) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 24) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 30) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429)
- 31) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638)
- 32) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah;
- 33) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur

- 35) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 71);
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 68);
- 38) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
- 39) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
- 40) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 61, Seri E);
- 41) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 49 Seri E);

- 42) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;
- 43) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi;
- 44) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Menyediakan dokumen perencanaan PD untuk kurun waktu dua tahun yang mencakup Gambaran Kerja, Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan PD sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur sebagai dasar perencanaan Pembangunan Daerah transisi Pemerintahan dan Pembangunan di Jawa Timur Tahun 2025-2026.
2. Sebagai pedoman kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja
3. Sebagai pedoman Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra PD disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan Sistematika sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan Pengertian Renstra PD, Fungsi Renstra PD dalam Penyelenggaraan Daerah, Proses Penyusunan Renstra PD dan Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renja PD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan Peraturan Perundangan yang mengatur SOTK dan Pedoman yang dijadikan Acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

1.3 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra bagi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

1.4 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Renstra Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 PD terkait dengan pengaturan Bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan SOTK Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memuat diantaranya Dasar Hukum pembentukan, Struktur Organisasi dan uraian tugas dan fungsi sampai dengan level Bidang.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menguraikan kondisi eksisting sumber daya yang dimiliki Dinas meliputi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Unit Usaha

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya sesuai dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Mengemukakan macam – macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab 3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan PD beserta faktor yang mempengaruhi

3.2 Isu Strategis

Metode penentuan isu strategis dan hasil penentuan isu strategis, dan apa saja yang akan ditangani melalui Renstra PD pada tahun rencana.

Bab 4 Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

4.2 *Cascading Kinerja Perangkat Daerah*

Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam 2 tahun mendatang. Dalam Bab ini disajikan matriks yang menunjukkan konsistensi dan relevansi antara pernyataan Visi dan Misi RPJMD dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan PD

Bab 6 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

6.1 Menguraikan program kegiatan, sub kegiatan beserta indikator target dan pagunya

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Perumusan program dan kegiatan menggunakan referensi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Tupoksi dan Uraian Tugas, dan Arahkan peraturan perundang – undangan.

6.2 Program Ikon Pembangunan Tahun 2025-2026

Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab 8 Penutup

Merupakan bagian pengesahan dan penegasan mengenai pentingnya penyusunan Renstra PD untuk peningkatan kinerja PD dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMD yang telah ditetapkan dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Selain itu, pada Penutup juga ditegaskan mengenai penggunaan Dokumen Renstra sebagai pedoman Penyusunan Renja PD dan RKA serta sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD selain untuk keperluan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra.

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN

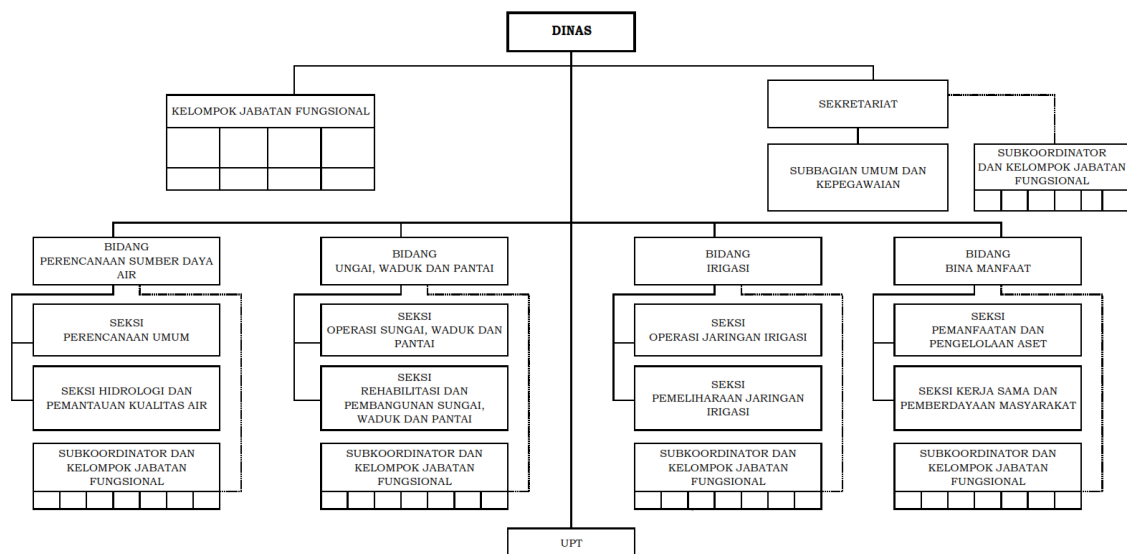
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk pasca berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah melalui proses *assesment* sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diambil keputusan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Pengairan (Nomenklatur sebelum berlakunya UU 23 Tahun 2014) berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dengan level Dinas Daerah Tipe A dimana Kepala Dinas (Es. IIa) membawahi Sekretaris (Es. IIIa) dan 4 (empat) Bidang setingkat Eselon IIIa.

Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang mulai berlaku efektif pada Tahun Anggaran 2017. Dan diperbaharui lagi dengan Pergub No 5 Tahun 2021 dengan tambahan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas PU Sumber Daya Air berdasarkan Pergub No 105 Tahun 2021

Mengingat rentang kendalanya yang cukup luas meliputi 38 Kabupaten/Kota seluas 47.779,975 km² wilayah daratan, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Kinerja Dinas PU Sumber Daya Air ditunjang dengan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di 6 (enam) kota di Jawa Timur yaitu Bojonegoro, Kediri, Pasuruan, Pamekasan, Bondowoso, dan Lumajang.

Sebelum berlakunya Pergub Nomor 49 Tahun 2018, UPT Dinas berjumlah 10 (sepuluh) unit terdiri dari 9 (sembilan) UPT Kewilayahan dan 1 (satu) UPT Peralatan. Sehubungan dengan rasionalisasi Jumlah UPT Provinsi sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dilakukan penggabungan dan penghapusan UPT sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1 Matriks Perubahan Kelembagaan dan Wilayah Kerja UPT

NO	PERGUB 107/2016	Wilayah Kerja	PERGUB 49/2018	Wilayah Kerja
1	UPT PSDA di Bojonegoro	Kab Tuban, Kab Bojonegoro, Kab Lamongan, Kab Gresik	UPT PSDA WS Bengawan Solo di Bojonegoro	Kab Tuban, Kab Bojonegoro, Kab Lamongan, Kab Gresik
2	UPT PSDA di Madiun	Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab/Kota Madiun, Kab Ngawi, Kab		Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab/Kota Madiun, Kab Ngawi, Kab Magetan
3	UPT PSDA di Kediri	Kab/Kota Kediri, Kab Trenggalek, Kab Nganjuk, Kab Jombang	UPT PSDA WS Brantas di Kediri	Kab/Kota Kediri, Kab Trenggalek, Kab Nganjuk, Kab Jombang
4	UPT PSDA di Malang	Kota Batu, Kab/Kota Malang, Kab/Kota Blitar, Kab Tulungagung	Dihapus (menjadi kordinator wilayah dengan tugas kewilayahan tetap)	Kota Batu, Kab/Kota Malang, Kab/Kota Blitar, Kab Tulungagung
5	UPT PSDA di Surabaya	Kota Surabaya, Kab/Kota Mojokerto, Kab Sidoarjo	Dihapus (menjadi kordinator wilayah dengan tugas kewilayahan tetap)	Kota Surabaya, Kab/Kota Mojokerto, Kab Sidoarjo
6	UPT PSDA di Pamekasan	Kab Bangkalan, Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep	UPT PSDA WS Madura - Bawean	Kab Bangkalan, Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep

NO	PERGUB 107/2016	Wilayah Kerja	PERGUB 49/2018	Wilayah Kerja
7	UPT PSDA di Pasuruan	Kab/Kota Pasuruan, Kab/Kota Probolinggo	UPT PSDA WS Welang Pekalen	Kab/Kota Pasuruan, Kab/Kota Probolinggo, Kec Lawang
8	UPT PSDA di Lumajang	Kab Lumajang, Kab Jember	UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Kab Lumajang, Kab Jember, Kab Banyuwangi (Sebagian) Kab. Malang (Sebagian)
9	UPT PSDA di Bondowoso	Kab Situbondo, Kab Bondowoso, Kab Banyuwangi	UPT PSDA WS Sampean Setail	Kab Situbondo, Kab Bondowoso, Kab Banyuwangi
10	UPT Depo Peralatan	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sungai Orde 1 sd 5 WS Provinsi Tanggap Darurat Seluruh	Dihapus (dilaksanakan oleh PPK Depo Peralatan yang dijabat oleh Es IV di Bidang Sungai	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sungai Orde 1 sd 5 WS Provinsi Tanggap Darurat Seluruh Wilayah Provinsi

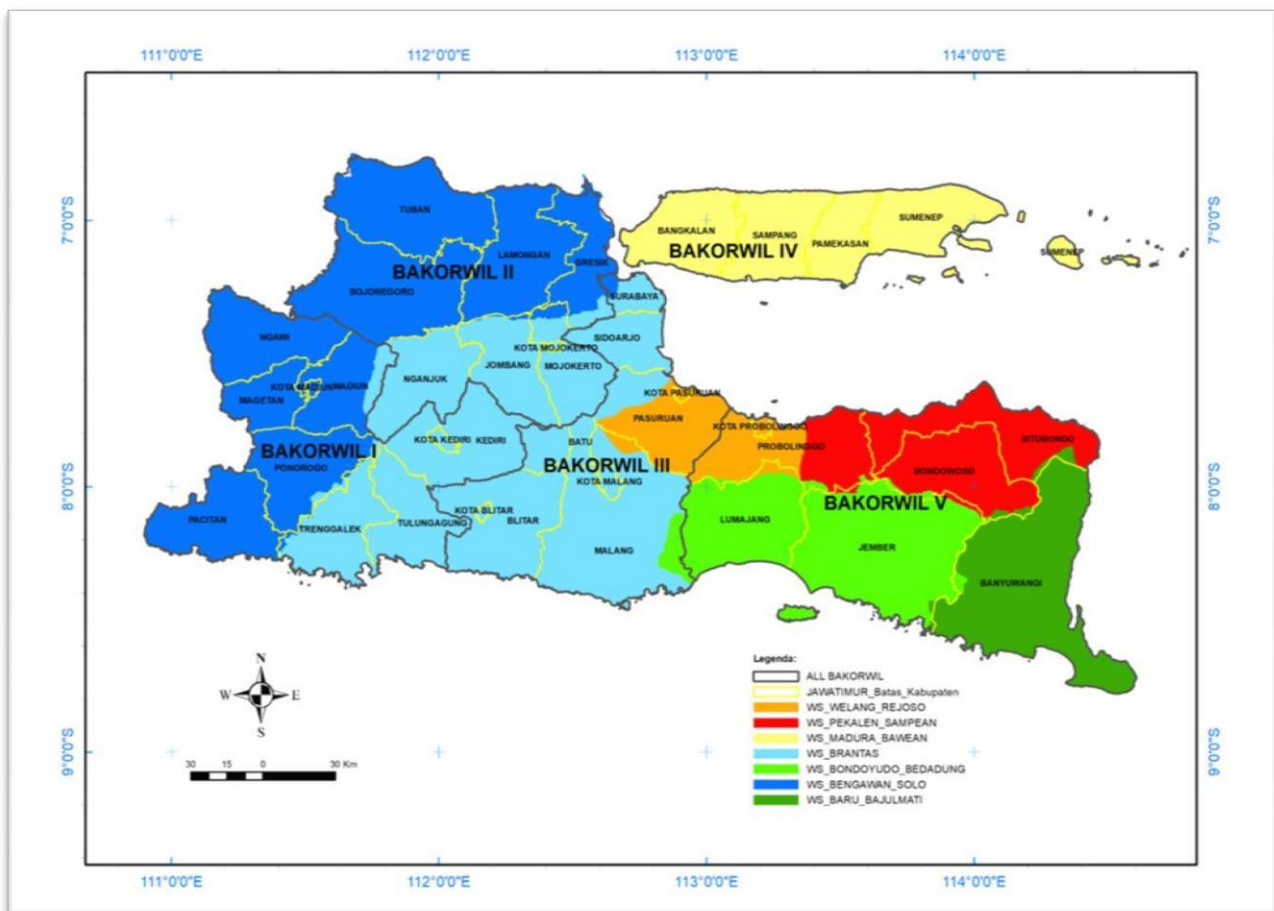
Salah satu hal yang mendasari perubahan UPT ini adalah adanya pemahaman, dari *Assessor* pada saat itu, mengenai beban kerja UPT Dinas di Wilayah Sungai Kewenangan Pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan 7 (Tujuh) Wilayah Sungai yang terdiri dari 2 (dua) Wilayah Sungai Kewenangan Pusat dan 5 (lima) Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi. Sedangkan Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota tidak ada di Provinsi Jawa Timur.

Wilayah Sungai dalam peraturan tersebut didefinisikan sebagai Kesatuan Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau – pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km². Sedangkan Daerah Aliran Sungai adalah wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak – anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Beban Kerja UPT yang berkedudukan di Wilayah Sungai Pusat, ditetapkan pada saat itu, merupakan kegiatan operasi dan pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dengan menganggap kegiatan lingkup Sumber Daya Air lain yang bersifat kewilayahan bukan menjadi tanggung jawab Provinsi karena merupakan Kewenangan Pusat. Hal tersebut berdampak pada penggabungan UPT Dinas yang berkedudukan di Wilayah Sungai Pusat hanya menjadi 1 (satu) UPT (**Tabel 2.1**).

Kegiatan Lingkup Sumber Daya Air yang bersifat kewilayahan dan dianggap bukan menjadi tanggung jawab Provinsi antara lain : Survey dan Inventarisasi dalam rangka mitigasi bencana (Tanggul Kritis Sungai), Pengelolaan data hidrologi pada pos hujan di luar Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi, Kegiatan Tanggap Darurat sementara penanganan tanggul putus, pembangunan tampungan air kecil dan usaha konservasi mata air.

Ketiadaan kegiatan di atas di Wilayah Sungai Pusat, yang sebenarnya merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, membawa konsekuensi bahwa kegiatan tersebut tetap dilaksanakan secara terbatas oleh UPT untuk keperluan pelaporan ke Kepala Dinas sebagai Atasan Langsung.



Gambar 2 Wilayah Kerja UPT Pengelolaan Sumber Daya Air dalam 3 layer batas (Layer Wilayah Sungai, Bakorwil dan Batas Kabupaten/Kota)

Selanjutnya, Tugas Pokok dan Fungsi masing – masing unit pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dapat dijabarkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 105 Tahun 2021 sebagai berikut :

Tugas Utama Dinas PU Sumber Daya Air adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Pekerjaan Umum dan Tugas Pembantuan, yang diselenggarakan dengan melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum sumber daya air;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum sumber daya air;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum sumber daya air;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pekerjaan umum sumber daya air; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Pasal 9, 12, 13 Undang – Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa tugas dan wewenang Pemerintah Daerah adalah:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- e. mengelola, kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas kabupaten / kota;
- h. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
- i. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah kabupaterr/ kota;
- j. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- k. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;
- l. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten dan/atau antarkota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan

m. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas PU Sumber Daya Air diklasifikasikan sebagai berikut :

A. Data Personil (Tenaga ASN, Pegawai Tidak Tetap, Pekarya)

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur didukung sebanyak 3478 orang personil terdiri dari ASN 556 orang dan Non ASN berdasarkan APBD 768 orang dan APBN 2154 orang. Jumlah personil PTTPK 299 orang dan Non PTTPK 469 orang.

Dimana jumlah pegawai ASN berdasarkan kesetaraan gender antara lain jumlah laki-laki 436 orang dan jumlah perempuan 120 orang. Jumlah personil Non ASN APBD berdasarkan kesetaraan gender yaitu jumlah laki-laki 719 orang dan jumlah perempuan 49 orang. Sedangkan Non ASN APBN jumlah laki-laki 2154 orang.

Tabel 2.2 Jumlah dan Komposisi Personil

NO	UNIT KERJA	PNS GOL. I				PNS GOL. II				PNS GOL. III				PNS GOL. IV				JENIS KELAMIN		TOTAL
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	L	P	
1	SEKRETARIAT	-	-	-	-	-	1	7	21	10	4	3	6	1	-	1	-	38	16	54
2	BIDANG BINA MANFAAT	-	-	-	-	-	-	4	5	2	4	1	3	2	1	-	-	16	6	22
3	BIDANG IRIGASI	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	3	4	4	-	-	-	11	10	21
4	BIDANG PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	3	3	-	-	-	10	7	17
5	BIDANG SUNGAI, WADUK DAN PANTAI	-	-	-	-	-	-	-	6	5	-	3	4	3	-	-	-	12	9	21
6	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO DI BOJONEGORO	-	-	-	1	2	1	7	59	20	17	-	10	1	-	-	-	89	29	118
7	UPT PSDA WS BONDYUDO BARU DI LUMAJANG	-	-	-	-	1	4	2	8	6	5	2	3	-	-	-	-	25	6	31
8	UPT PSDA WS BRANTAS DI KEDIRI	-	-	-	2	2	6	47	39	13	14	4	7	3	-	-	-	117	20	137
9	UPT PSDA WS KEP MADURA DI PAMEKASAN	-	-	-	-	1	2	5	8	3	1	2	1	-	-	-	-	20	3	23
10	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL DI BONDOWOSO	-	-	-	4	2	1	6	13	7	3	-	6	-	-	-	-	39	3	42
11	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN DI PASURUAN	-	-	-	1	-	1	10	28	6	3	-	3	1	-	-	-	46	7	53
TOTAL		-	-	-	8	7	15	85	186	86	59	21	51	19	1	1	-	423	116	539

B. Data Sumber Air (Sungai, Mata Air, Waduk, Embung)

Secara umum, Infrastruktur Sumber Daya Air yang berperan dalam penyediaan air baku di Jawa Timur adalah Sungai, Mata Air, Waduk dan Embung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai, di Provinsi Jawa Timur terdapat 688 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan sebaran : 96 DAS di Wilayah Sungai Bengawan Solo, 220 DAS di WS Brantas, 489 DAS di WS Kepulauan Madura, 47 DAS di WS Bondoyudo Bedadung, 56 DAS di WS Pekalen Sampean, dan 60 DAS di WS Baru Bajulmati.

Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat untuk Wilayah Sungai Bengawan Solo dan WS Brantas. Sedangkan Wilayah

Sungai lainnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Di Jawa Timur tidak ada Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Infrastruktur sumber air selanjutnya adalah Mata Air. Berdasarkan data terakhir tahun 2010, terdapat 2213 lokasi mata air dengan Total potensi debit (hanya sebagian yang dapat diukur) sebesar 4300 m³/det. Sebaran mata air menurut Wilayah Sungai dijelaskan sebagai berikut : 164 mata air di WS Bengawan Solo, 62 mata air di WS Brantas, 165 mata air di WS Welang Rejoso, 178 mata air di WS Pekalen Sampean, 194 mata air di WS Baru Bajulmati, 639 mata air di WS Bondoyudo Bedadung dan 143 mata air di WS Kepulauan Madura.

Waduk, Bendungan, Embung dan Telaga secara umum dibedakan berdasarkan kapasitas tampungan yang dimiliki. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan, Waduk (apabila disertai infrastruktur lengkap disebut Bendungan) diklasifikasikan dengan syarat memiliki Tinggi Bendung 15 meter atau lebih yang diukur dari pondasi terdalam, atau tampungan yang memiliki tinggi bendung 10 sampai dengan 15 meter dengan panjang crest minimal 500 meter, tampungan minimal 500.000 m³ atau Debit banjir maksimal 1000 m³/detik.

Tampungan yang tidak memenuhi Peraturan Menteri di atas disebut dengan Embung, sedangkan Tampungan yang terbentuk alami disebut dengan Telaga. Di Jawa Timur, terdapat 87 tampungan berbagai klasifikasi dengan total tampungan sebesar 1.113.389.630 m³. Sampai dengan Akhir Juni 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang melaksanakan pembangunan 6 unit Bendungan di Jawa Timur yang menelan biaya 7,15 Trilyun Rupiah dengan lokasi yaitu Bendo (Ponorogo), Tukul (Pacitan), Tugu (Trenggalek), Bagong (Trenggalek), Gongseng (Bojonegoro) dan Semantok (Nganjuk). Pada saat beroperasi, Bendungan tersebut direncanakan membawa manfaat tambahan Luas Tanam Irigasi sebesar 18.712 ha, air baku sebesar 2.255 liter/detik dan Potensi tambahan listrik sebesar 2,11 MW (di Bendungan Tugu, Gongseng dan Semantok).

C. Data Irigasi (Luas Di Kewenangan, Bangunan Utama dan Saluran)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi, di Provinsi Jawa Timur terdapat 934.683 ha Sawah Beririgasi yang dibagi menjadi 289.508 ha Kewenangan Pusat, 164.823 ha Kewenangan Provinsi, dan 480.352 ha Kewenangan Kabupaten.

Sawah beririgasi Kewenangan Provinsi tersebar dalam 168 Daerah Irigasi dengan Jumlah Bangunan Utama/Bendung sejumlah 170 buah, Panjang Saluran Primer Total sama dengan 345,21 km; Saluran Sekunder 1354, 66 km dan Saluran Pembuang sepanjang 92,99 km.

Selain bangunan utama dan saluran pembawa, terdapat bangunan pendukung antara lain Bangunan Bagi, Bangunan Sadap, Bangunan Bagi Sadap, Talang, Siphon dan Gorong – gorong yang berjumlah total 3255 unit.

D. Data Hidrologi dan Kualitas Air

Pada tahun 2019 dikelola 535 pos hujan (dari 977 pos hujan pada tahun anggaran 2018), 46 pos duga air, dan 5 stasiun klimatologi. Selain itu, terdapat 54 titik pemantauan kualitas air badan air (ABA). Data tersebut, berdasarkan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, secara rutin dikonsolidasikan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Klimatologi Karangploso Malang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Data Indikator Kinerja Daerah dan Rasio Penyerapan Anggaran disajikan pada **Tabel 2.3** dan **Tabel 2.4**. Data tersebut merupakan tolok ukur dalam menilai Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Selama Kurun 2014 – 2019, Kinerja Daerah telah tercapai rata – rata 100% untuk semua indikator. Sedangkan Penyerapan anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir mencapai 90,73% rerata dengan Total Rerata Anggaran yang dikelola per tahun sebesar Rp. 1.022.203.261.089 dengan penyerapan sebesar Rp. 923.737.889.726.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Presentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Bertambahnya jumlah bangunan utama dan Panjang saluran pembawa/pembuang yang diperbaiki	68.85	68.9	68.95	69	68.86	68.9	68.954	69.013	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Ketahanan Air	Meningkatkan ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	2.92	2.94	2.96	2.98	2.95	3	3.03	3.3	101%	102%	102%	111%
3	Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat	82.9	83	83.1	83.2	85.19	85.76	86.8	86.95	103%	103%	104.50%	104.50%
4	Persentase Penurunan Jumlah Desa yang Terdampak Kerugian akibat Kejadian Banjir	Menurunkan kejadian banjir di Sungai-sungai yang rawan setelah Pembangunan parapet dan normalisasi	5.57%	5.51%	5.45%	5.39%	5.70%	7.65%	8.65%	8.82%	102%	139%	159%	163.64%
5	Peningkatan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	84.16	84.26	84.36	84.46	84.47	85.13	85.25	86.94	100%	101%	101%	103%

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

Kode	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Tahun Ke-		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp112,355,172,181	Rp139,295,651,586	Rp 105,690,718,293	Rp 134,358,225,497	94.07	96.46	Rp 125,825,411,884	Rp 120,024,471,895
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp235,967,800	Rp192,137,863	Rp 154,279,644	Rp 186,592,665	65.38	97.11	Rp 214,052,832	Rp 170,436,155
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp98,311,148,956	Rp100,252,613,729	Rp 93,014,201,131	Rp 96,537,252,140	94.61	96.29	Rp 99,281,881,343	Rp 93,014,201,131
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,992,853,078.00	14,159,753,580.00	Rp 4,637,788,900	Rp 13,643,870,623	92.89	96.36	Rp 9,576,303,329	Rp 4,637,788,900
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	283,913,360.00	512,514,918.00	Rp 244,125,400	Rp 503,429,642	85.99	98.23	Rp 398,214,139	Rp 244,125,400
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp5,505,399,249	Rp12,217,397,268	Rp 4,972,660,864	Rp 11,716,295,390	90.32	95.90	Rp 8,861,398,259	Rp 4,972,660,864
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,025,889,738.00	11,961,234,228.00	Rp 2,627,497,929	Rp 11,770,785,037	86.83	98.41	Rp 7,493,561,983	Rp 7,199,141,483
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp385,889,522,819	Rp384,662,914,503	Rp 328,304,093,129	Rp 355,404,935,019	85.08	92.39	Rp 375,276,218,661	Rp 341,854,514,074
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp247,766,909,727	Rp193,161,052,062	Rp 231,145,665,842	Rp 188,177,907,001	93.29	97.42	Rp 220,463,980,895	Rp 209,661,786,422

Kode	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Tahun Ke-		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah	Rp 138,122,613,092	Rp 191,501,862,441	Rp 97,158,427,287	Rp 167,227,028,018	70.34	87.32	Rp 164,812,237,767	Rp 132,192,727,653
Total		Rp 996,489,390,000	Rp 1,047,917,132,178	Rp867,949,458,419	Rp979,526,321,032	85.88	95.59	Rp 1,022,203,261,089	Rp 923,737,889,726

Kinerja serapan anggaran di atas 90% dapat dicapai karena dilaksanakan percepatan penyerapan anggaran di Triwulan Awal dengan strategi :

- a. Pekerjaan Pelelangan Umum dengan nilai di atas 200 juta dilaksanakan proses Lelangnya di awal tahun dengan target pekerjaan dapat dilaksanakan/terkontrak pada awal musim kemarau (bulan April)
- b. Belanja Modal, Pembinaan Teknik Staf, Kegiatan Fisik Pengadaan Langsung dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II
- c. Pada Pertengahan Tahun (Akhir Triwulan II) dilaksanakan evaluasi serapan anggaran untuk kemudian dapat diproyeksikan anggaran yang akan dialokasikan ulang pada APBD Perubahan

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur pada kelompok sasaran 38 Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain:

- 1 Melaksanakan Pembangunan infrastruktur di Kabupaten/Kota terutama di bidang Sumber Daya Air;
- 2 Melakukan antisipasi terhadap kebencanaan utamanya Banjir pada Sungai dan Saluran di Kabupaten/Kota yang merupakan kewenangan Provinsi Jawa Timur;
- 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap infrastruktur Sumber Daya Air milik Provinsi yang ada di Kabupaten.Kota.

Dalam pengembangan Pelayanan Pengelolaan Sumber Daya Air ke depan, didapatkan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra yaitu :

1. Tuntutan untuk merespon kejadian banjir lebih cepat

Akan dilaksanakan penambahan kapasitas untuk kegiatan Siaga Banjir. Kegiatan ini akan menjadi tanggung jawab Bidang Sungai, Waduk dan Pantai yang saat ini membawahi unit Alat Berat dan Depo Peralatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa : pengadaan Steel Sheet Pile dan Alat Berat Pancang (Crane), pengadaan bahan banjir dan upah yang bersifat stand by dan bersifat on call. Dengan penambahan kapasitas diharapkan Dinas PU Sumber Daya Air lebih siap dan responsif dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana banjir yang bersifat sementara tetapi memiliki usia guna yang lebih panjang sampai dengan penanganan banjir permanen dilaksanakan.

b. Tantangan untuk menambah cakupan pantauan kualitas air

Meskipun kualitas air bukan merupakan Tugas Pokok Utama Dinas PU Sumber Daya Air, dalam rangka mendukung upaya pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Timur dari Angka Awal 66,36 (2020) menjadi 68,22 – 68,58 (2024) maka pada tahun 2020 akan dibuat Laboratorium Mini Kualitas Air yang akan berlokasi di Kantor Pusat Surabaya. Laboratorium ini bertujuan :

- A. memanfaatkan kembali peralatan kualitas air di UPT;
- B. meningkatkan kemampuan tenaga pengelola pemantauan kualitas air
- C. menambah cakupan titik pantau dalam rangka pengendalian
- D. menyajikan data awal kondisi kualitas air

c. Penurunan Kinerja Layanan Irigasi akibat Perubahan SOTK

Mengingat semakin berkurangnya jumlah dan komposisi tenaga lapangan karena purna tugas dan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten/Kota, perlu dilakukan upaya untuk meng-*upgrade* Tenaga Petugas Pintu Air menjadi Juru Pengairan. Berdasarkan Data 2017, kekurangan tenaga kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi mencapai 981 orang dari Kebutuhan Tenaga sebanyak 1941 orang dengan sebaran : 13 Pengamat Irigasi, 85 Petugas Operasi Bendung, 90 Juru Pengairan, 262 Petugas Pintu Air dan 531 Pekarya Saluran. Pemenuhan Tenaga Operasi dan Pemeliharaan merupakan prasyarat untuk memenuhi Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (AKNOP) dalam rangka menuju OP Ideal

d. Perlunya prioritas penanganan banjir

Dalam rangka penanganan banjir, telah disusun daftar panjang 30 (tiga puluh) sungai di Jawa Timur yang rawan banjir. Daftar ini disusun berdasarkan Rekapitulasi Laporan Kejadian Banjir yang masuk pada 3 tahun terakhir dan dijelaskan pada **Tabel 2.5**.

Tabel 2.5 Sungai Rawan Banjir yang diprioritaskan 2020 - 2024

No	Wilayah Sungai	SUNGAI	KABUPATEN
1	BONDOYUDO BARU	Sungai Tanggul	Jember
2	BONDOYUDO BARU	Sungai Sanenrejo	Jember
3	BONDOYUDO BARU	Sungai Mayang	Jember
4	BONDOYUDO BARU	Sungai Jatiroto	Lumajang
5	BONDOYUDO BARU	Sungai Rawaan	Lumajang
6	BONDOYUDO BARU	Sungai Bondoyudo	Lumajang
7	BONDOYUDO BARU	Sungai Glidik	Lumajang
8	BONDOYUDO BARU	Sungai	Lumajang
9	BONDOYUDO BARU	Sungai Asem	Lumajang

No	Wilayah Sungai	SUNGAI	KABUPATEN
10	MADURA	Sungai Asemtanto	Bangkalan
11	MADURA	Sungai Blega	Bangkalan
12	MADURA	Sungai Semajid	Pamekasan
13	MADURA	Sungai Klampis	Sampang
14	MADURA	Sungai Patrean	Sumenep
15	MADURA	Sungai Sarokah	Sumenep
16	SAMPEAN SETAIL	Sungai Bate	Banyuwangi
17	SAMPEAN SETAIL	Sungai Bajulmati	Banyuwangi
18	SAMPEAN SETAIL	Sungai Blambangan	Banyuwangi
19	SAMPEAN SETAIL	Sungai Bluncong	Bondowoso
20	SAMPEAN SETAIL	Sungai Sampean	Bondowoso
21	SAMPEAN SETAIL	Sungai Patemon	Situbondo
22	SAMPEAN SETAIL	Sungai Curah Udang	Situbondo
23	SAMPEAN SETAIL	Sungai Selowogo	Situbondo
24	WELANG PEKALEN	Sungai Welang	Pasuruan
25	WELANG PEKALEN	Sungai Rejoso	Pasuruan
26	WELANG PEKALEN	Sungai Petung	Pasuruan
27	WELANG PEKALEN	Sungai Gembong	Pasuruan
28	WELANG PEKALEN	Sungai Kasuran	Pasuruan
29	WELANG PEKALEN	Sungai Laweyan	Pasuruan
30	WELANG PEKALEN	Sungai Pekalen	Probolinggo

e. Mempertahankan Ketahanan Pangan

Untuk mendukung ketahanan pangan, maka rencana Pengelolaan Jaringan Irigasi disusun dengan membuat daftar dan jadwal pelaksanaan Rehabilitasi Daerah Irigasi selama 5 tahun ke depan. Rencana ini didasarkan pada data 122 (seratus dua puluh dua) Jaringan Irigasi yang sudah dilaksanakan kegiatan PAI (Pengelolaan Aset Irigasi) dari 164 Jaringan Irigasi yang menjadi Kewenangan Provinsi sebagaimana dijelaskan pada **Tabel 2.6**.

Tabel 2.6 Data Jaringan Irigasi yang sudah di studi PAI (Pengelolaan Aset Irigasi)

NO.	DAERAH IRIGASI	KAB. / KOTA	JUMLAH LUAS (HA)	TAHUN STUDI	PRAKIRAAN BIAYA TAHUN 2018 (Rp)
I	UPT PSDA WS BRANTAS DI KEDIRI				
1	Bakalan	Kab/Kota Malang	148	2016	1.002.562.500
2	Bodo	Kab/Kota Malang	156	2010	266.061.000
3	Kajar	Kab/Kota Malang	20	2016	1.962.868.500
4	Pakis	Kab/Kota Malang	726	2016	4.925.356.500
5	Kalilanang	Kab Malang/Kota Batu	457	2010	81.000.000
6	Kebalon	Kab/Kota Malang	107	2016	6.688.191.000
7	Losawi	Kab/Kota Malang	39	2016	1.203.982.500

NO.	DAERAH IRIGASI	KAB. / KOTA	JUMLAH LUAS (HA)	TAHUN STUDI	PRAKIRAAN BIAYA TAHUN 2018 (Rp)
8	Ngukir	Kab Malang/Kota Batu	282	2010	76.800.000
9	Sengkaling Kanan	Kab/Kota Malang	193	2013	133.738.014.000
10	Sengkaling Kiri	Kab/Kota Malang	455	2013	-
11	Gelang	Kab Tulungagung	1378	2014	438.768.000
12	Jatinom	Kab/Kota Blitar	56	2017	347.148.000
13	Jempor	Kab/Kota Blitar	54	2017	317.560.500
14	Widoro	Kab Trenggalek/ Kab Tulunga	2946	2010	3.345.499.500
15	Kaliboto	Kab Tulungagung	165	2014	7.875.000
16	Paingan	Kab Trenggalek/ Kab Tulunga	551	2014	4.275.000
17	Tambak Rejo	Kab/Kota Blitar	23	2017	173.179.500
18	Ploso Tengah	Kab/Kota Blitar	51	2017	510.270.000
19	Ngrebo	Kab/Kota Blitar	62	2017	548.532.000
20	Sawahan	Kab/Kota Blitar	82	2017	1.076.943.000
21	Rembang	Kab/Kota Blitar	42	2017	182.356.500
22	Sukorame	Kab/Kota Blitar	69	2017	427.324.500
23	Sbr. Gayam	Kab Trenggalek/ Kab Tulunga	1926	2014	201.085.500
24	Sumbertulung	Kab/Kota Blitar	38	2016	450.355.500
25	Sumber berjo	Kab/Kota Blitar	45	2016	528.406.500
26	Jaten	Kab Blitar/ Kab Kediri	461	2016	80.970.000
27	Turi	Kab/Kota Malang	119	2016	332.230.500
28	Dermen	Blitar	1763	2017	73.495.444.500
29	Pohblembem	Kab Kediri	1086	2012	1.755.714.000
30	Ketandan	Kab Kediri	1637	2012	1.759.491.000
31	Gunting	Kab/Kota Kediri	369	2016	12.034.800.000
32	Kembangan	Kab/Kota Kediri	281	2016	9.822.307.500
33	Klitik Kresek	Kab/Kota Kediri	108	2016	631.042.500
34	Klitik Bendokrosok	Kab/Kota Kediri	332	2016	22.665.000
35	Kedung Gerit	Kab Nganjuk	1470	2014	75.154.500
36	Jatimlerek	Kab Jombang	1812	2012	3.293.497.500
37	Slumbung	Kab Jombang	1182	2017	140.925.000
38	Kejagan	Kab Jombang/Kab Mojokerto	288	2016	12.546.000
39	Tawang Sari	Kab Jombang/Kab Mojokerto	62	2018	11.700.000
40	Kaweden	Kab Jombang/Kab Mojokerto	69	2018	7.890.000
41	Badas	Kab Jombang/Kab Kediri	445	2016	678.376.500
42	Betis/Ngreco	Kab/Kota Kediri	38	2017	140.440.500
43	Bujel	Kab/Kota Kediri	113	2017	217.687.500
44	Ngablak	Kab/Kota Kediri	245	2017	466.191.000
45	Pesantren	Kab/Kota Kediri	69	2017	155.250.000
46	Penewon	Kab/Kota Mojokerto	971	2018	5.829.273.000
47	Sinoman	Kab/Kota Mojokerto	293	2018	435.274.500
48	Subantoro	Kab/Kota Mojokerto	515	2018	8.219.052.000
	JUMLAH		23.799		278.122.338.000
8	Kuluhan	Kab Magetan/Kab Ngawi	209	2015	56.325.000
9	Dung Timun	Kab Magetan/Kab Ngawi	215	2014	333.007.500
10	Dung lo	Kab Magetan/Kab Ngawi	165	2014	345.015.000
11	Kerep	Kab Magetan/Kab Ngawi	2340	2010	737.881.500
12	Klalung	Kab Magetan/Kab Ngawi	629	2012	1.415.250.000
13	Taji/Tinil	Kab Magetan/Kab Ngawi	789	2015	402.789.000
14	Jabung	Kab Magetan/Kab Ngawi	13	2013	148.035.000
15	Kedungrejo	Kab Ngawi/ Kab Madiun	1554	2015	814.756.500

NO.	DAERAH IRIGASI	KAB. / KOTA	JUMLAH LUAS (HA)	TAHUN STUDI	PRAKIRAAN BIAYA TAHUN 2018 (Rp)
16	Bekoh	Kab Ngawi	1921	2012	4.322.250.000
17	Gurdo	Kab Ngawi	1593	2012	3.584.250.000
18	Guyung	Kab Ngawi	1246	2012	2.803.500.000
19	Kedung Bendo	Kab Ngawi	1341	2012	82.207.500
20	Teguhan	Kab Ngawi	1337	2012	3.008.250.000
21	Widodaren	Kab Ngawi	1372	2012	732.031.500
22	Cepogo	Kab Ponorogo	1000	2014	2.250.000.000
23	Dalem	Kab Ponorogo	1403	2014	18.322.234.500
24	Watu Putih	Kab Ponorogo	1096	2012	3.495.826.500
25	Sumorobangun	Kab Ponorogo	1787	2012	1.500.454.500
26	Mojopurno	Kab/Kota Madiun	50	2015	353.490.000
27	Kalangan	Kab Magetan/Kab Ngawi	20	2015	111.240.000
28	Galok Atas/Soponyono	Kab Magetan/Kab Ponorogo	54	2015	794.400.000
29	Pang	Kab Ngawi	1046	2015	3.109.572.000
30	C a w a k	Kab Bojonegoro	1733	2011	6.852.244.500
31	Wd. Leran	Kab Bojonegoro	1144	2012	1.150.866.000
32	Pirang	Kab Bojonegoro	1347	2010	200.353.500
33	M a i b i t	Kab Tuban	1229	2013	3.186.598.500
34	N g l i r i p	Kab Tuban	1292	2013	2.452.027.500
35	Merak Urak	Kab Tuban	1475	2013	1.559.149.500
36	Rawa Jabung	Kab Lamongan	2143	2014	464.586.000
37	Wd. Sumengko	Kab Lamongan/ Kab Gresik	1146	2014	6.975.000
38	Wd.Gogor	Kab Gresik	1054	2013	866.935.500
39	Wd.Lowayu	Kab Gresik	1430	2013	99.385.500
40	Kali Wadak	Kab Gresik	1476	2013	107.544.000
	JUMLAH		43.459		75.253.591.500
VI	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA DI PAMEKASAN				
1	Dam Umbul	Kab Bangkalan	1085	2012	1.223.211.000
2	Tunjung	Kab Bangkalan	1807	2012	960.936.000
3	Samiran	Kab Pamekasan	2462	2010	54.897.000
4	Jepun	Kab Sumenep	1424	2013	9.207.420.000
	JUMLAH		6.778		11.446.464.000
	TOTAL JAWA TIMUR		112.114		461.493.760.500

f. Tantangan Keberlanjutan Data Hidrologi di Wilayah Sungai Pusat

Setelah berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, tugas dan fungsi UPT Provinsi pada Wilayah Sungai Kewenangan Pusat menjadi lebih terbatas pada Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi, Pemeliharaan Aset dan Monitoring Banjir.

Akan tetapi masih terdapat kegiatan Kewenangan Pusat yang diharapkan tetap berlanjut karena terkait dengan rekaman data *time series*. Saat ini terdapat 259 pos hujan yang

tersebar di Wilayah Sungai Kewenangan Pusat yang sebelum tahun 2019 pengambilan datanya dilaksanakan oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi.

Seiring dengan perubahan peraturan dan penyerahan kewenangan, pada tahun 2018, 259 pos hujan tersebut diserahkan kembali untuk dikelola Pemerintah Pusat melalui Balai Besar yang ada di Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Brantas. Namun proses penyerahan tersebut tidak dapat dilaksanakan, sehingga mulai Tahun Anggaran 2020, Dinas PU Sumber Daya Air akan melaksanakan kembali pengelolaan pos hujan sejumlah 50 pos di Wilayah Sungai Bengawan Solo dan 67 pos di Wilayah Sungai Brantas.

g. Analisa Kesetaraan Gender di lingkup Sumber Daya Air

Kesetaraan Gender berangkat dari kesenjangan dalam pemberdayaan perempuan yang dapat berupa berbagai bentuk, misalkan: diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki, kesenjangan partisipasi politik, rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak maupun kesenjangan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki;

Upaya untuk menurunkan ketimpangan tersebut di atas, pada sisi perencanaan anggaran dilakukan melalui anggaran yang responsif gender, yaitu anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

Kegiatan Anggaran Responsif Gender bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tapi lebih kepada mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya, serta mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

Pada lingkup Sumber Daya Air, Kegiatan Kesetaraan Gender untuk periode 2025-2026 dipilih Kegiatan Pemeliharaan Irigasi, Kepengurusan Komisi Irigasi dan Kepengurusan HIPPA, dan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

h. Kelompok Sasaran Layanan

Beberapa kelompok sasaran layanan yang dicakup meliputi:

1. Masyarakat Umum:

- Memastikan ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya air.
- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi air dan pengelolaan sumber daya air.

2. Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta:

- Menyusun regulasi dan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya air secara efektif.
 - Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan proyek-proyek infrastruktur air.
3. Lembaga Pendidikan dan Penelitian:
- Kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan pemahaman tentang sumber daya air dan dampak perubahan iklim.
 - Memberikan pelatihan dan pendidikan terkait pengelolaan sumber daya air.
4. Pemerintah Pusat:
- Bersinergi dalam implementasi kebijakan nasional terkait pengelolaan sumber daya air.
 - Mendukung pengembangan proyek-proyek strategis di tingkat nasional.
5. Instansi Pemerintah Terkait Lainnya:
- Menjalinkan kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian dalam upaya pengelolaan air yang terintegrasi.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Setelah pada Bulan Februari tahun 2015 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang – Undang 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan menyatakan berlakunya kembali Undang – Undang 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, lingkup Sumber Daya Air khususnya di bidang Pekerjaan Umum mengalami kondisi status quo. Hal ini disebabkan karena aturan turunan produk Undang – Undang 7/2004 juga turut dibatalkan. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung terlalu lama karena kemudian pada bulan April 2015, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri yang dijadikan payung hukum untuk melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan Sumber Daya Air.

Pada saat Naskah Rencana Strategis ini disusun, Undang – Undang Sumber Daya Air pengganti UU 11/1974 sedang dalam pembahasan tingkat akhir antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah. Selanjutnya disahkanlah Undang-Undang baru UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air yang otomatis membatalkan Undang-undang sebelumnya ditetapkan dijadikan payung hukum untuk melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan Sumber Daya Air, Selain permasalahan payung hukum, masalah pokok Sumber Daya Air di Jawa Timur dirumuskan sebagai berikut :

- a. Jumlah, kualitas, kontinuitas dan aksesibilitas sumber daya air masih belum optimal
Penyediaan air baku masih menjadi tantangan di Jawa Timur setiap tahunnya. Kemampuan menyediakan air baku tidak dapat mengejar tingginya lajukebutuhan air yang terus bertambah. Sementara pemanfaat air baik yang memiliki ijin pemanfaatan maupun yang memanfaatkan untuk kepentingan sosial memiliki kecenderungan untuk menggunakan air melebihi ketentuan/ atau boros. Hal tersebut diperparah dengan sebaran ketersediaan air yang tidak merata. Daerah Pulau Madura, Dataran tinggi dan Daerah Pantai cenderung kekurangan air karena potensi air permukaan dan air tanah yang kurang. Sedangkan di daerah dataran rendah, potensi air baku cenderung surplus terhadap kebutuhan. Pada lokasi dimana air bersih mudah didapatkan seperti di hilir Sumber Air Umbulan Pasuruan, penggunaan air cenderung berlebihan. Selain penggunaan air yang belum dapat dikendalikan, berkurangnya tutupan lahan di Hulu Daerah Aliran Sungai pada sebagian besar DAS di Jawa Timur menyebabkan bertambahnya Debit Banjir dan Debit Sedimen. Air hujan yang seharusnya ditahan/meresap ke dalam tanah (infiltrasi) sebagian besar berubah menjadi limpasan

permukaan (run off) dan mengalir ke sungai. Dengan debit banjir yang lebih besar, aliran banjir mampu menyebabkan erosi tebing dan memindahkan deposit material (termasuk batu besar) lebih jauh ke arah hilir. Deposit material yang tersedimentasi di hilir DAS dan di meander/belokan sungai juga bertambah. Pada Sungai yang variasi debitnya tahunannya cukup besar (intermitten), deposit material tersebar merata sepanjang sungai karena pada saat aliran rendah, material akan terdeposit di badan air.

b. Belum Optimalnya pengelolaan Irigasi

Tidak hanya permasalahan pemenuhan Anggaran Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (AKNOP), infrastruktur irigasi di Jawa Timur (terutama bangunan utama) sudah mendekati usia guna bangunan sehingga saatnya dilakukan rehabilitasi total tuntas per Daerah Irigasi. Pondasi bangunan utama terutama di bagian kolam olak secara umum terjadi gerusan dan menyebabkan hilangnya lantai bendung, pintu penguras bergeser/miring sehingga tidak dapat dioperasikan, dan puncak pelimpah bendung sebagian hilang sehingga air tidak dapat masuk ke Saluran Irigasi sesuai tinggi rencana. Selain kondisi fisik bangunan dan jaringan yang memerlukan rehabilitasi, kondisi lingkungan di sekitar jaringan irigasi juga memerlukan perhatian. Pengawasan yang belum optimal (karena cakupan wilayah dan personil yang tidak memadai) mengakibatkan pemanfaatan sempadan irigasi tidak terkendali. Pada sebagian besar lokasi ditemui bangunan liar, tanaman keras (misal sengon) maupun tanaman yang berpotensi merusak pasangan tebing (misal rumput gajah). Perusakan dan pencurian pintu air irigasi masih terjadi di beberapa tempat terutama di lokasi yang jauh dari pemukiman dan minim penjagaan dari petani saat pembagian air gilir glondong. Kelembagaan, personil lapangan dan koordinasi antar OPD masih menjadi Pekerjaan Rumah bagi berbagai level institusi pengelola Sumber Daya Air di Jawa Timur. Pemenuhan personil lapangan sesuai AKNOP masih jauh dari kebutuhan ideal. Jumlah Petugas Operasi Bendung (POB), Penjaga Pintu Air (PPA), dan Pekarya Saluran Irigasi masih jauh dari kebutuhan personil lapangan ideal (lihat Bab 2). Di tingkat pengamat/kantor lapangan, kebutuhan Pengamat Pengairan dan Juru Pengairan yang sebelumnya dilaksanakan staf OPD Kabupaten/Kota juga berkurang karena pengurangan staf secara alami (purna tugas) dan penyesuaian kantor UPT/UPTD karena perubahan peraturan. Kelembagaan Komisi Irigasi (KOMIR) juga perlu diperkuat dengan peningkatan peran Komir dalam penetapan kebijakan di level Kabupaten, mengesahkan Rencana Tata Tanam Global (RTTG), dan penyelesaian permasalahan irigasi lainnya.

c. Masih terdapat lokasi rawan banjir permanen

Banjir merupakan salah satu bencana yang paling cepat meningkatkan angka kemiskinan secara mendadak. Sehingga upaya minimal yang bisa dilakukan adalah menyiapkan sistem peringatan dini kejadian banjir untuk meminimalkan resiko kerugian masyarakat. Kondisi sungai di Jawa Timur secara umum adalah daya tampung Sungai berkurang secara vertikal (Sedimentasi) sementara penambahan tampungan secara horisontal (pelebaran dan pemanfaatan sempadan) sulit dilakukan. Upaya normalisasi cukup efektif mengurangi resiko banjir di beberapa lokasi sungai, sementara pada lokasi membutuhkan infrastruktur perkuatan tanggul seperti parapet. Kemampuan Provinsi untuk membangun infrastruktur besar pengendali banjir seperti waduk, bendung dan tampungan memanjang masih harus ditingkatkan mengingat infrastruktur tersebut membutuhkan biaya cukup besar. Selain lokasi genangan rutin yang ditangani dengan normalisasi dan parapet, terdapat lokasi yang merupakan kawasan rawan banjir. Lokasi rawan banjir ini merupakan lokasi yang apabila tidak segera ditangani/dikelola dapat meningkatkan resiko banjir atau dapat menghambat penanganan banjir di kemudian hari. Lokasi rawan banjir ditangani dengan kegiatan perkuatan tebing, pengamanan aset, penertiban bangunan liar dan pemasangan patok kepemilikan tanah.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Jumlah, kualitas, kontinuitas dan aksesibilitas sumber daya air masih belum optimal	Belum terkendalinya pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Air	Pengendalian Penerbitan Rekomendasi Teknik Sumber Daya Air belum optimal
			Pengendalian dan Pengawasan Aset Sumber Daya Air belum optimal
		Perlu peningkatan kualitas data dan koordinasi lintas sektor	Relokasi pos hujan belum berbasis hasil rasionalisasi hidrologi
			Perlu peningkatan kualitas pemantauan pos hujan dan duga air yang mendukung flood early warning system dan pengumpulan data
			Perlu peningkatan kualitas data dan peningkatan kemampuan analisa alokasi
			Kaji ulang DED sungai dan Irigasi belum seluruhnya dilakukan pada lokasi prioritas
		Kapasitas resapan di Hulu Daerah Aliran Sungai belum optimal	Upaya konservasi sipil teknis dan vegetatif di hulu belum optimal

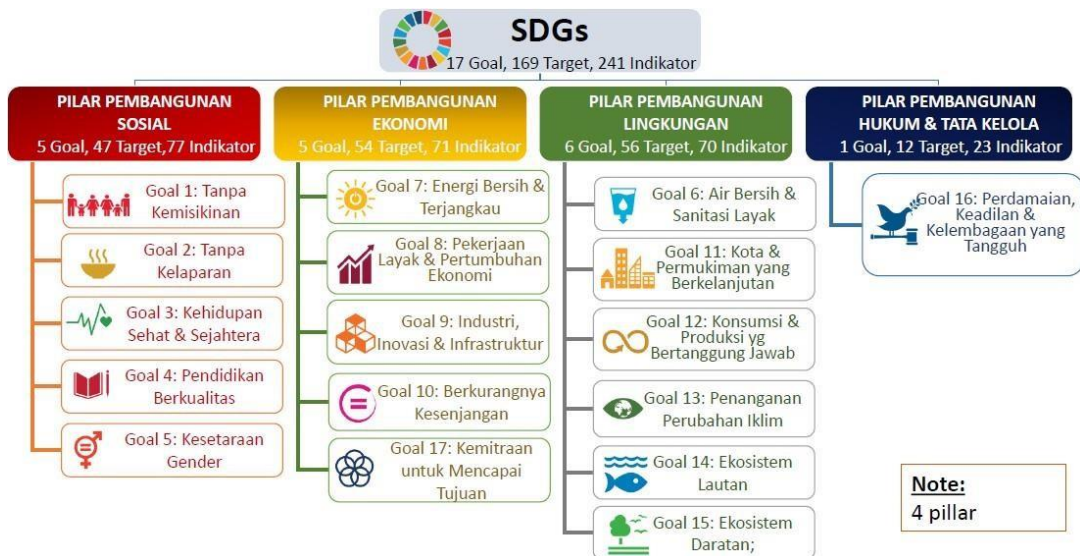
No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Belum optimalnya pengelolaan Irigasi	Kinerja Jaringan Irigasi belum optimal	Banyak Bangunan Utama yang mengalami kerusakan Banyak kebocoran di Saluran Primer dan Sekunder Perbaikan Pintu air dan Pembuang
			Perlu pengerukan Rutin Saluran Primer dan Sekunder
		Optimalisasi kebutuhan air irigasi	Perlu Pemenuhan kebutuhan tenaga Juru Pengairan Provinsi di DI Provinsi
			Pengelolaan Irigasi partisipatif yang melibatkan P3A belum
			Perlu pembentukan dan penguatan Komisi Irigasi di Kabupaten
			Percepatan pengesahan Perda Irigasi
			Pemenuhan anggaran Angka Kebutuhan Nyata Operasi Irigasi (AKNOP) minimal 50% dengan trend penambahan 5%
			Perkuatan Institusi OP Irigasi

3.2. Isu Strategis



Telah disepakati pada Sidang Umum PBB Sept 2015. SDGs Merupakan kelanjutan Millenium Development Goals (MDGs) yang bertujuan untuk mencapai Kemajuan semua bangsa di Dunia. SDGs mencakup 17 tujuan 169 target 241 indikator. Di Indonesia, komitmen terhadap pencapaian SDGs/Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs.



Gambar 3.1 Pilar Pembangunan dalam TPB

(Sumber : Paparan Bappenas 2018)

Dalam TPB, dukungan Lingkup Sumber Daya Air masuk dalam pencapaian Pilar Pembangunan Lingkungan yang secara umum, bertanggung jawab untuk penyediaan air baku (Goal 2 dan Goal 6), keberlanjutan ekosistem dan mitigasi bencana akibat daya rusak air (Goal 13).

Merupakan komitmen Nasional dalam mengantisipasi perubahan iklim melalui tindakan adaptasi. Secara Nasional, telah dideklarasikan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) pada tahun 2005 yang fokus dalam kegiatan antara lain konservasi sumber air/tampungan, pencegahan kerusakan lingkungan, penanaman pohon, dan kampanye hemat air.



Merupakan indikator kapasitas daerah dalam menghadapi kerentanan (vulnerability) dan ancaman (hazard) bencana meteorologi dan bencana geologi. Terdapat 7 (tujuh) strategi peningkatan kapasitas daerah, yang untuk lingkup Sumber Daya Air dapat dikategorikan dalam Strategi 5 : Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Berdasarkan dokumen Pengurangan Resiko Bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan unsur Pekerjaan Umum untuk memenuhi Strategi 5 : Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana adalah :

- a. Pengurangan frekwensi dan dampak bencana banjir melalui pembuatan biopori dan sumur resapan
- b. Pengurangan frekwensi dan dampak bencana banjir melalui perlindungan daerah tangkapan air
- c. Pengurangan frekwensi dan dampak bencana banjir melalui restorasi sungai
- d. Pengurangan frekwensi dan dampak tanah longsor melalui penguatan lereng
- e. Penguatan aturan daerah tentang pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan untuk pengurangan resiko bencana kekeringan
- f. Penguatan aturan daerah tentang pengembangan sistem pengelolaan dan pengembangan area hulu DAS untuk deteksi dan pencegahan bencana banjir bandang
- g. Penerapan bangunan tahan gempa bumi dalam penerbitan IMB
- h. Pembangunan zona peredam gelombang tsunami pada daerah beresiko
- i. Pemeliharaan dan peningkatan ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota



Kebijakan Satu Peta

Merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian 1 : 50.000. Kebijakan ini mendukung percepatan pembangunan nasional melalui integrasi peta dan data spasial sehingga akan memiliki satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal. Dinas PU Sumber Daya Air berkontribusi dalam penyiapan data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Daerah Irigasi



Anggaran Responsif Gender

Merupakan Komitmen untuk memberikan manfaat pembangunan yang sama bagi Laki – laki, Perempuan dan anak – anak melalui anggaran yang lebih berkeadilan. Untuk Dinas PU Sumber Daya Air, kegiatan pengelolaan Irigasi dipilih sebagai Kegiatan Responsif Gender. Mengingat manfaat irigasi dirasakan oleh semua.

Berikut Kawasan yang menjadi fokus utama dalam mendorong percepatan Pembangunan ekonomi di Jawa Timur di bidang sumber daya air:

2. Kawasan Gerbangkertosusila Plus

Dilakukan pengendalian banjir di Kali Lamong dan Pembangunan Bendungan Karangnongko. Dalam upaya pengendalian banjir Kali Lamong, Langkah-langkah fisik yang diambil mencakup normalisasi dan revitalisasi, Pembangunan parapet, serta perkuatan tebing dan embing. Sementara itu, Bendungan Karangnongko direncanakan dengan tujuan antara lain, penyediaan suplai air untuk daerah irigasi Karangnongko dan sebagai penyedia air baku, terutama untuk Kabupaten Bojonegoro, Ngawi, Tuban, dan Blora.

3. Kawasan Bromo – Tengger – Semeru

Beberapa infrastruktur pengelolaan sumber daya air di Kawasan Bromo – Tengger – Semeru mencakup Pengendalian Banjir di Kali Kedunglarangan dan Pembangunan Tanggul di Sungai Jatiroto. Dalam upaya pengendalian banjir di Kali Kedunglarangan, Langkah normalisasi tidak hanya diarahkan untuk mengurangi risiko banjir di bagian hulu, tetapi juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai saluran untuk mengalirkan air ke sistem irigasi tambak ikan dan sawah pertanian. Sedangkan dalam ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan di Sungai Jatiroto focus pekerjaan mencakup Pembangunan tanggul dan penguatan tebing sebagai respons terhadap risiko banjir yang dapat dipicu oleh hujan dan keterbatasan daya tampung saluran drainase dari wilayah hulu.

4. Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Terdapat rencana Pembangunan Bendungan Bagong dan Pengendalian Banjir Sungai Grindulu. Tujuan utama Pembangunan Bagong adalah untuk mendukung pengairan irigasi di Kabupaten Trenggalek, khususnya untuk komoditas unggul seperti padi dan palawija. Langkah ini sejalan dengan misi Program Strategis Nasional (PSN) untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan air. Sementara pada pengendalian banjir Sungai Grindulu, dilakukan pekerjaan revertment (bronjong) dan pembuatan parapet.

Dari Telaah yang telah dilakukan, Isu – Isu Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Timur untuk periode 2025 – 2026 dirumuskan sebagai berikut :

1. Menambah tampungan air baku di permukaan melalui revitalisasi tampungan yang sudah ada baik di sungai maupun waduk

2. Meningkatkan resapan air di hulu DAS untuk mengurangi resiko bencana dan menambah simpanan air tanah
3. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengelola Sumber Daya Air sebagai upaya memperkuat rencana pembangunan berbasis Daerah Aliran Sungai
4. Mendukung Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nasional dalam rangka Ketahanan Pangan
5. Memantapkan ketahanan air dalam rangka mendukung sektor strategis, pencegahan bencana dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Merupakan rumusan target yang akan dicapai selama 2 tahun, yaitu tahun 2025 - 2026 Tujuan Jangka Menengah yang ditetapkan adalah Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air dengan Indikator Tujuan “**Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik**” selama 2 tahun yang merupakan upaya dalam meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal RPD	Target		Kondisi Akhir
					2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air		Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	69.00	69.05	69.10	69.10
2		Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Presentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	83.20	83.30	83.40	83.40
3		Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.46	84.56	84.66	84.66

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
													2025	2026
Meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase meningkatnya ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Meningkatnya Indeks Ketahanan Air	Indeks Ketahanan Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Menurunnya jumlah desa yang terdampak banjir	% Penurunan Jumlah Desa yang terdampak Kerugian akibat kejadian banjir sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan infrastruktur pengendali dan normalisasi di WS Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Rp 948,924,275.00	Rp 948,924,275.00
										Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Rp 115,576,000.00	Rp 115,576,000.00
										Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Rp 1,401,775,000.00	Rp 1,401,775,000.00
										Tersusunnya pola dan rencana pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Rp 1,640,210,800.00	Rp 1,640,210,800.00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
													2025	2026
										Tercukupinya kebutuhan air di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rp 2,000,000,000.00	Rp 2,000,000,000.00
										Terdeteksinya kejadian banjir lebih dini	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Rp 1,201,720,001.00	Rp 1,201,720,001.00
										Terbangunnya bangunan perkuatan tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Rp 7,919,414,000.00	Rp 7,919,414,000.00
										Meminimalisir terjadinya longsor di sepanjang badan sungai	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Rp 10,451,420,500.00	Rp 10,451,420,500.00
										Terpeliharanya Sungai Kewenangan Provinsi	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Normalisasi/ Restorasi/ Pemeliharaan Sungai	Rp 19,311,520,787.00	Rp 19,311,520,787.00
										Terlindunginya mata air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Rp 200.000.000.00	Rp 200.000.000.00
										Sistem FFWS lebih baik dan akurat setelah dilakukan upgrade	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Rp 748,302,098.00	Rp 748,302,098.00
										Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Rp 500,000,000.00	Rp 500,000,000.00
										Tersusunnya dokumen hidrologi dan kualitas air	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Rp 4,740,416,315.00	Rp 4,740,416,315.00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
													2025	2026
											Kewenangan Provinsi			
										Terbina nya kelembagaan pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Rp 547,000,000.00	Rp 547,000,000.00
										Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi dapat dipertanggung jawabkan secara teknis	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Rp 3,907,863,100.00	Rp 3,907,863,100.00
										Koordinasi antar Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi dapat terjalin secara komprehensif dan berkelanjutan	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Rp 3,141,868,285.00	Rp 3,141,868,285.00
										Terpeliharanya Danau Kewenangan Provinsi	Jumlah Danau yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Rp 980.000.000.00	Rp 980.000.000.00
										Terpeliharanya Sungai Kewenangan Provinsi	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Rp 17,166,305,437.00	Rp 17,166,305,437.00
										Terpeliharanya Infrastruktur untuk Pelindung Mata Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Rp 8,838,630,500.00	Rp 8,838,630,500.00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran			
															2025	2026
										Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Rp 3,047,328,378.00	Rp 3,047,328,378.00		
							Meningkatnya Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya kelembagaan Pengelola Irigasi yang terpadu	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi (Sub Kegiatan Baru)	Rp 250,000,000.00	Rp 250,000,000.00		
										Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rp 1,048,311,000.00	Rp 1,048,311,000.00		
										Kinerja Jaringan Irigasi bekerja dengan optimal	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 36,231,441,000.00	Rp 36,231,441,000.00		
										Kinerja Bendung Irigasi bekerja dengan optimal	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Rp 13,721,768,474.00	Rp 13,721,768,474.00		
										Terlaksananya Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 71,742,784,769.00	Rp 71,742,784,769.00		
										Terkelolanya Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Rp 3,956,496,064.00	Rp 3,956,496,064.00		

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Merupakan tahapan perencanaan dimana pada tahap ini dilakukan perumusan deduktif mulai dari masalah pokok, langkah – langkah strategis pemecahan masalah sampai ke detail arah kebijakan.

Arah kebijakan (dijelaskan pada **Tabel 5.1**) selanjutnya menjadi rancangan program/kegiatan dalam Rencana Anggaran Dinas PU Sumber Daya Air 2025-2026. Dalam rencana ini, Rancangan Program/Kegiatan sudah mengakomodasi rencana – rencana kegiatan seperti :

- a. Modernisasi Irigasi
- b. Kegiatan Rehabilitasi Sungai yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus
- c. Pengelompokan ulang Kegiatan ex Depo Peralatan yang fokus pada kegiatan Normalisasi Saluran Pembawa/Pembuang, Sungai dan Tampungan.
- d. Kegiatan yang mendukung Target sektoral seperti Indeks Resiko Bencana, Kesetaraan Gender, dan Daya Dukung Lingkungan

Secara teknis penganggaran, Arah Kebijakan selanjutnya dijabarkan dalam Program/Kegiatan dengan indikator dan tolok ukur pencapaian kegiatan (**Tabel 6.1**).

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air			
	1.1.Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	1. Peningkatan Kinerja Jaringan Irigasi 2. Optimalisasi kebutuhan air irigasi	1. Rehabilitasi Bangunan Utama 2. Pengurangan kebocoran di Saluran Primer dan Sekunder 3. Perbaikan Pintu air dan Pembuang 4. Pengerukan Rutin Saluran Primer dan Sekunder 5. Pemenuhan kebutuhan tenaga Juru Pengairan Provinsi di DI Provinsi 6. Pengelolaan Irigasi partisipatif melibatkan P3A 7. Pembentukan dan penguatan Komisi Irigasi di Kabupaten 8. Percepatan pengesahan Perda Irigasi 9. Pemenuhan anggaran Angka Kebutuhan Nyata Operasi Irigasi (AKNOP) minimal 50% dengan trend penambahan 5% per tahun 10. Perkuatan Institusi OP Irigasi 11. Penyediaan data OP yang sah (valid) dan akurat 1. Inisiasi Modernisasi Irigasi
	1.2.Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Perencanaan Program sesuai tahapan	2. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Perencanaan Pemantauan dan pengendalian program/Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Pertanggung jawaban keuangan yang akuntabel 3. Pembinaan Pegawai	3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi laporan keuangan Verifikasi dokumen pertanggung jawaban 4. Peningkatan kapasitas pegawai 5. Penyusunan program pembinaan pegawai baik teknis maupun administratif

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan merupakan jembatan antara proses perencanaan dengan penganggaran. Program dan Kegiatan yang berisi uraian kegiatan, selanjutnya dirinci menjadi Sub Kegiatan.

Rincian tabel mengikuti format dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berisikan Tujuan, Sasaran, Kode, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indicator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan data capaian awal perencanaan Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian kegiatan maka ditetapkan indikator dan target yang akan dicapai. Berikut ini dijelaskan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 sampai Tahun 2026, dan dicantumkan lokasi dan unit penanggung jawabnya.

Perihal pemuktahiran peraturan Kemendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan, Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, maka kodefikasi sub kegiatan sedikit banyak berubah. Mengenai pencapaian Rencana Program dan Kegiatan dijelaskan secara rinci pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Ketahanan Air	3.05 indeks	3.15 indeks	135,229,318,000	3.20 indeks	129,654,287,000	3.20 indeks	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur
1.03.02.1.01	Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Desa yang terdampak Kerugian akibat kejadian banjir	5.39 persen	5.33 persen	71,224,416,000	5.27 persen	68,288,085,000	5.27 persen	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur
1.03.02.1.01.0019	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	1 unit	1 unit	380,000,000	1 unit	364,334,000	1 unit	Tersebar di Sungai Kew. Provinsi Jawa Timur
1.03.02.1.01.0072	Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	1 unit	1 unit	50,000,000	1 unit	47,939,000	1 unit	Tersebar di Sungai Kew. Provinsi Jawa Timur

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	
1.03.02.1.01.0093	Operasi dan Pemeliharaan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dipelihara	2 unit	14 unit	2,428,517,000	14 unit	2,328,397,000	14 unit	Tersebar di Mata Air Kew. Provinsi Jawa Timur
1.03.02.1.01.0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	18 km	18 km	20,057,486,000	18 km	19,230,591,000	18 km	Tersebar di Sungai Kew. Provinsi Jawa Timur
1.03.02.1.01.0112	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Jumlah Danau yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 danau	2 danau	1,100,000,000	2 danau	1,054,651,000	2 danau	Tersebar di Danau Kew. Provinsi Jawa Timur
1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 unit	1 unit	50,000,000	1 unit	47,938,000	1 unit	Tersebar di Danau Kew. Provinsi Jawa Timur

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	
1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	180 Dokumen	200 Dokumen	2,823,727,000	200 Dokumen	2,707,315,000	200 Dokumen	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur
1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	5 lembaga	5 lembaga	381,700,000	5 lembaga	365,964,000	5 lembaga	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur
1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	10 Dokumen	70 Dokumen	6,106,528,000	70 Dokumen	5,854,776,000	70 Dokumen	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur
1.03.02.1.01.0055	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 unit	5 unit	1,100,000,000	5 unit	1,054,651,000	5 unit	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	
1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0.5 KM	0.5 KM	3,330,371,000	0.5 KM	3,193,071,000	0.5 KM	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur
1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	10 KM	10 KM	20,077,171,000	10 KM	19,249,459,000	10 KM	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur
1.03.02.1.01.0104	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	1 Unit	1 Unit	110,000,000	1 Unit	105,465,000	1 Unit	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur
1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.5 KM	0.5 KM	3,430,220,000	0.5 KM	3,288,804,000	0.5 KM	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur
1.03.02.1.01.0106	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1 KM	1.34 KM	3,886,938,000	1.34 KM	3,726,694,000	1.34 KM	Tersebar di Kab/Kota Provinsi

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	
									Jawa Timur
1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,541,993,000	1 Dokumen	2,437,195,000	1 Dokumen	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur
1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	574,000,000	3 Dokumen	550,336,000	3 Dokumen	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur
1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusing	1 Dokumen	1 Dokumen	469,000,000	1 Dokumen	449,665,000	1 Dokumen	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	
1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen 637,327,000	2 Dokumen 611,052,000	2 Dokumen	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur		
1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi		1 Lembaga	1 Lembaga 1,589,438,000	1 Lembaga 1,523,911,000	1 Lembaga	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur		
1.03.02.1.01.0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul yang direhabilitasi	0.5 KM	0,5 KM 100,000,000	0,5 KM 95,877,000	0,5 KM	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	
1.03.02.1.02	Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	83.20 persen	83.25 persen	64,004,902,000	83.30 persen	61,366,202,000	83.30 persen	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur
1.03.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya	176 DI	176 DI	5,722,479,000	176 DI	5,486,561,000	176 DI	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur
.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	615,57 KM	1,927 KM	44,249,952,000	1,927 KM	42,425,680,000	1,927 KM	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur
1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1 Bendung	1 Bendung	1,559,110,000	1 Bendung	1,494,833,000	1 Bendung	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	23,32 KM	36 KM	9,630,933,000	36 KM	9,233,883,000	36 KM	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur
1.03.02.1.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	-	6 Lembaga	2,119,485,000	6 Lembaga	2,032,106,000	6 Lembaga	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur
1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	3 Dokumen	722,943,000	3 Dokumen	693,139,000	3 Dokumen	Tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	82 indeks	84 indeks	-	85 indeks	-	85 indeks	Dinas PU SDA Prov. Jatim
		Persentase Indikator Program Yang Tercapai	92 persen	94 persen	136.513.577.244	95 persen	137.424.099.110	95 persen	Dinas PU SDA Prov. Jatim
		Persentase Realisasi Anggaran	92 persen	94 persen	-	95 persen	-	95 persen	Dinas PU SDA

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	
									Prov. Jatim
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	203,898,237	2 Dokumen	207,976,202	2 Dokumen	Dinas PU SDA Prov. Jatim
X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	92,842,000	4 Laporan	92,842,000	4 Laporan	Dinas PU SDA Prov. Jatim
X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	59,002,000	5 Laporan	59,002,000	5 Laporan	Dinas PU SDA Prov. Jatim
X.XX.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	21,861,000	1 Dokumen	21,861,000	1 Dokumen	Dinas PU SDA Prov. Jatim

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	
X.XX.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen 21,861,000	1 Dokumen 21,861,000	1 Dokumen 21,861,000	1 Dokumen	Dinas PU SDA Prov. Jatim	
X.XX.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen 22,861,000	1 Dokumen 22,861,000	1 Dokumen 22,861,000	1 Dokumen	Dinas PU SDA Prov. Jatim	
X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen 21,861,000	1 Dokumen 21,861,000	1 Dokumen 21,861,000	1 Dokumen	Dinas PU SDA Prov. Jatim	
X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen 16,973,000	1 Dokumen 16,973,000	1 Dokumen 16,973,000	1 Dokumen	Dinas PU SDA Prov. Jatim	
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	12 laporan	12 laporan 106,388,875,710	12 laporan 106,388,875,710	12 laporan 106,388,875,710	12 laporan	Dinas PU SDA Prov. Jatim	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	
X.XX.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen 29,633,000	1 Dokumen 29,633,000	1 Dokumen 29,633,000	1 Dokumen	Dinas PU SDA Prov. Jatim	
X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan 72,400,000	12 Laporan 72,400,000	12 Laporan 72,400,000	12 Laporan	Dinas PU SDA Prov. Jatim	
X.XX.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen 20,463,000	1 Dokumen 20,463,000	1 Dokumen 20,463,000	1 Dokumen	Dinas PU SDA Prov. Jatim	
X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan 23,167,000	2 Laporan 23,167,000	2 Laporan 23,167,000	2 Laporan	Dinas PU SDA Prov. Jatim	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	
X.XX.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen 23,662,000	12 Dokumen 23,662,000	12 Dokumen 23,662,000	12 Dokumen	Dinas PU SDA Prov. Jatim	
X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen 29,165,000	12 Dokumen 29,165,000	12 Dokumen 29,165,000	12 Dokumen	Dinas PU SDA Prov. Jatim	
X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	18 Dokumen 1,776,562,000	18 Dokumen 1,776,562,000	18 Dokumen 1,776,562,000	18 Dokumen	Dinas PU SDA Prov. Jatim	
X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	521 Orang/Bulan	521 Orang/Bulan 112,427,805,000	521 Orang/Bulan 112,427,805,000	521 Orang/Bulan 112,427,805,000	521 Orang/Bulan	Dinas PU SDA Prov. Jatim	
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	12 laporan	12 laporan 14,159,753,580	12 laporan 14,159,753,580	12 laporan 14,159,753,580	12 laporan	Dinas PU SDA Prov. Jatim	
X.XX.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen 4,398,111,000	12 Dokumen 4,398,111,000	12 Dokumen 4,398,111,000	12 Dokumen	Dinas PU SDA Prov. Jatim	
X.XX.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen	6 Dokumen 982,836,000	6 Dokumen 982,836,000	6 Dokumen 982,836,000	6 Dokumen	Dinas PU SDA Prov. Jatim	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	
X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	725,065,000	12 Dokumen	725,065,000	12 Dokumen	Dinas PU SDA Prov. Jatim
X.XX.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	7 Unit	6,882,444,000	7 Unit	6,882,444,000	7 Unit	Dinas PU SDA Prov. Jatim
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	12 laporan	12 laporan	500,000,000	12 laporan	500,000,000	12 laporan	Dinas PU SDA Prov. Jatim
X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	63,828,000	3 Dokumen	63,828,000	3 Dokumen	Dinas PU SDA Prov. Jatim
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	7 Laporan	613,207,000	7 Laporan	613,207,000	7 Laporan	Dinas PU SDA Prov. Jatim
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	12 laporan	12 laporan	12,000,000,000	12 laporan	12,000,000,000	12 laporan	Dinas PU SDA Prov. Jatim

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	
X.XX.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	16 Laporan	7,182,384,000	16 Laporan	7,182,384,000	16 Laporan	Dinas PU SDA Prov. Jatim
X.XX.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	18 Laporan	1,321,508,000	18 Laporan	1,321,508,000	18 Laporan	Dinas PU SDA Prov. Jatim
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	1 Laporan	18 Laporan	4,751,856,000	18 Laporan	4,751,856,000	18 Laporan	Dinas PU SDA Prov. Jatim
X.XX.01.1.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2,380,000	1 Laporan	2,380,000	1 Laporan	Dinas PU SDA Prov. Jatim
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	12 laporan	12 laporan	10,000,000,000	12 laporan	10,000,000,000	12 laporan	Dinas PU SDA Prov. Jatim

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir	Lokasi
				2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	19 Unit	2,652,269,600	19 Unit	2,652,269,600	19 Unit	Dinas PU SDA Prov. Jatim
X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	32 Unit	1,715,713,000	32 Unit	1,715,713,000	32 Unit	Dinas PU SDA Prov. Jatim
X.XX.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	5,775,000	1 Unit	5,775,000	1 Unit	Dinas PU SDA Prov. Jatim
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	88 Unit	4,276,849,000	88 Unit	4,276,849,000	88 Unit	Dinas PU SDA Prov. Jatim
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	312,219,000	1 Unit	312,219,000	1 Unit	Dinas PU SDA Prov. Jatim

6.2. Program Icon Pembangunan Tahun 2025 – 2026

Program prioritas Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 selaras dengan yang telah diprogramkan di Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026, sebagai berikut.

Tabel 6.2 Program Prioritas Pembangunan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2026

Program Prioritas Provinsi	Program Icon	Indikator	Target		Kode Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program Nomenklatur
			2025	2026					
Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Pengembangan & Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)	Pengembangan & Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)	175 Daerah Irigasi	175 Daerah Irigasi	1.03.02	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Penanganan Banjir	Jumlah lokasi Pengelolaan Banjir yang dilakukan	5 Lokasi	5 Lokasi			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	1 Unit	1 Unit				Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Operasi dan Pemeliharaan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dipelihara	2 unit	2 unit				Operasi dan Pemeliharaan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	60 km	60 km				Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Jumlah Danau yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 danau	2 danau				Operasi dan Pemeliharaan Danau	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Prioritas Provinsi	Program Icon	Indikator	Target		Kode Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program Nomenklatur
			2025	2026					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	2 lembaga	2 lembaga				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	180 Dokumen	190 Dokumen				Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	5 lembaga	5 lembaga				Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	10 Dokumen	10 Dokumen				Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	8 unit	8 unit				Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	3 KM	3 KM				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	10 KM	10 KM				Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	60 KM	60 KM				Normalisasi/Restorasi Sungai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Prioritas Provinsi	Program Icon	Indikator	Target		Kode Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program Nomenklatur
			2025	2026					
	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1 KM	1 KM			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya	176 DI	176 DI				Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	615,57 KM	615,57 KM				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	3 Bendung	3 Bendung				Rehabilitasi Bendung Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	23,32 KM	23,32 KM				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga				Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dengan 69,05 % pada tahun 2025 menjadi 69,10% pada Akhir tahun 2026. Untuk mencapai kondisi ini, dilakukan upaya antara lain :

- a. Meningkatkan secara bertahap anggaran Angka Kebutuhan Nyata Operasi Pemeliharaan Irigasi (AKNOP) secara bertahap minimal 50% sampai akhir tahun 2026. Pemenuhan AKNOP merupakan prasyarat utama untuk mempertahankan pelayanan air dan meningkatkan kinerja Jaringan Irigasi
- b. Memenuhi secara bertahap kebutuhan Juru Pengairan, Petugas Operasi Bendung, Penjaga Pintu Air dan Pekarya Saluran dalam rangka memastikan kebutuhan tenaga lapangan sesuai dengan beban kerja dan mampu menjangkau seluruh jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Melakukan review desain terhadap dokumen perencanaan Irigasi pada 120 Daerah Irigasi yang telah dilakukan SID dan telah melewati umur perencanaan, termasuk desain prioritas rehabilitasi bangunan utama.

Arah kebijakan selanjutnya menjadi rancangan program/kegiatan, dan secara spesifik berusaha menjawab Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah yang secara umum dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tuntutan untuk merespon kejadian banjir lebih cepat.

Diantisipasi dengan penempatan anggaran untuk melaksanakan penanggulangan sementara kejadian daya rusak air di 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis. Besarnya anggaran yang dialokasikan maksimal Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) per UPT dengan penempatan anggaran di kegiatan Unit Siaga Banjir Bidang Sungai, Waduk dan Pantai atau dapat ditempatkan di masing – masing UPT. Kegiatan penanggulangan sementara yang dapat dilaksanakan dengan Dana ini antara lain : penanggulan sementara menggunakan alat berat/manual, penggunaan bahan banjiran (Karung pasir, sesek bambu, bongkotan) untuk pembuatan tanggul sementara, penggunaan untuk pembayaran upah pekerja.

Selain itu, untuk mempercepat proses pelaporan, digunakan aplikasi berbasis android bernama Sistem Informasi Bencana Banjir (SIBB) yang direncanakan dapat memberi laporan dan asesmen penyebab/kerugian bencana banjir lebih cepat dari pada penggunaan Form A dan Form B Laporan Banjir yang selama ini memerlukan waktu lebih

dari 1 hari untuk proses pengumpulan data, pembuatan laporan, otorisasi dan penyampaian laporan ke Ibu Gubernur.

Leading Unit : Bidang Sungai, Waduk dan Pantai

b. Tantangan untuk menambah cakupan pantauan kualitas air

Sebagai upaya mendukung peningkatan Indeks Lingkungan Hidup terutama kualitas air, mulai Tahun 2020 kegiatan pemantauan kualitas air akan di perluas cakupannya melalui pengoperasian kembali laboratorium mini kualitas air. Diharapkan dengan beroperasinya laboratorium mini, kebutuhan data kualitas air untuk keperluan analisa internal dapat dilakukan lebih cepat.

Leading Unit : Bidang Perencanaan Sumber Daya Air

c. Penurunan Kinerja Layanan Irigasi akibat Perubahan SOTK

Selama periode Renstra, Dinas PU Sumber Daya Air akan melakukan peningkatan kualitas SDM lapangan dengan target Juru Pengairan Provinsi akan mengelola Daerah Irigasi Provinsi. Hal ini dilakukan mengingat Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Kabupaten dan Provinsi membawa konsekuensi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kabupaten yang mengelola Daerah Irigasi berbasis Administratif (Tanpa memandang Kewenangan) di rasionalisasi.

Salah satu contoh, UPTD Sumber Daya Air Bangil di bawah Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang sebelumnya mengelola DI Bekacak (Kewenangan Provinsi) harus dirasionalisasi bergabung dengan UPTD Purwosari. Sehingga DI Bekacak yang sebelumnya dikelola tenaga Kabupaten mengalami kekosongan pengelola karena Provinsi belum siap tenaga pengelola.

Leading Unit : Bidang Irigasi

TABEL 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Kondisi Kinerja pada Awal RPD	Target		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2024	2025	2026	
1	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	69.00	69.05	69.10	69.10
2	Indeks Profesionalitas ASN	82.00	84.00	85.00	85.00

BAB 8

PENUTUP

Demikianlah, kami sampaikan Rencana Strategis Tahun 2025-2026 Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Rencana Strategis Tahun 2025-2026 ini akan menjadi acuan dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsi Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur serta akan dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur mendatang.

Selain itu Rencana Strategis Tahun 2025-2026 merupakan dasar untuk program/kegiatan Tahun 2024 dan diharapkan dapat mendukung peran, tugas dan fungsi Unit kerja seperti Bidang dan Unit Pelayanan Teknis Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur pada khususnya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada umumnya.

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan terutama adalah Kondisi ketidak pastian akibat kenaikan harga energi dan pangan. Selain itu perlu juga diperhatikan antara lain Pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan produk hukum terbaru seperti Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum dan Pelaksanaan Kegiatan, Peraturan Pengadaan Barang/Jasa, Surat Keputusan tentang Organisasi Pengadaan.

Atas telah tersusunnya Rencana Strategis Tahun 2025-2026 Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, kami ucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini.

Surabaya, Desember 2023

KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR



Ir. BAJU TRIHAKSORO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199403 1 008